

KESIAPAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENYIAPKAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) KOTA SURAKARTA
UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
MELALUI KEBIJAKAN MEREK

Oleh: Alexander Adelbertus Kurniawan¹, Noegroho Amien Sutijarto²

INTISARI

Penulisan Hukum dengan judul “Kesiapan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menyiapkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Kota Surakarta Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Melalui Kebijakan Merek”, bertujuan mengetahui apakah Peraturan Daerah Kota Surakarta No 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM mampu menyelesaikan upaya UMKM Kota Surakarta dalam menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui kebijakan yang dikeluarkan terkait Merek bagi UMKM di Kota Surakarta.

Metode penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Lokasi penelitian di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan studi dokumen.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan UMKM merupakan langkah awal Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya menyiapkan UMKM Kota Surakarta dan selama ini kebijakan fasilitasi Hak atas Merek yang ada di Surakarta hanya ditujukan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) bukan bagi UMKM, fasilitasi ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, UMKM, Merek.

¹ Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**THE READINESS OF THE GOVERNMENT OF SURAKARTA IN
SETTING SURAKARTA MICRO, SMALL, AND MEDIUM
ENTERPRISES (SMES) TO FACE THE 2015 ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY THROUGH TRADEMARK DISCRETION**

By: Alexander Adelbertus Kurniawan³, Noegroho Amien Sutijarto⁴

ABSTRACT

Legal writing with title “The Readiness of The Government Of Surakarta In Setting Surakarta Micro, Small, And Medium Enterprises (Smes) To Face The 2015 Asean Economic Community Throught Trademark Discretion”, aims to determine whether the city of Surakarta local regulations Number 5 of 2014 about the empowerment of SMEs capable of completing the efforts of Surakarta City SMEs in the face of competition in the 2015 ASEAN Economic Community and know the effort made by the Surakarta City government through trademark discretion for Surakarta City SMEs.

Methods of research in this legal writing using a kind of normative empirical research. Research sites in the City of Surakarta, Central Java Province. Data Collection was done through interview and document study.

Local regulation number 5 of 2014 about the empowerment of SMEs is the first step of Surakarta City government in an effort to prepare Surakarta City SMEs and the facilitation discretion for trademark rights in the City of Surakarta is only intended for small dan medium-sized industries not for SMEs, this facilitation is issued by the Department of Industry and Commerce.

Keywords: ASEAN Economic Community, SMEs, Trademark.

³ S1 Student of Faculty of Law Gadjah Mada University

⁴ Faculty of Law, Gadjah Mada University